

PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SMP NEGERI 3 PANCA RIJANG KABUPATEN SIDRAP

*The Implementation of School Operational Assistance Program
At SMP 3 Panca Rijang of Sidrap Regency*

Syamsir¹, Muh. Arifin Ahmad², Andi Cudai Nur³

Email: syamsir Yusuf27@gmail.com

Abstract: This research aims to find out three things concerning the Implementation of School Operational Assistance Program In SMP 3 Panca Rijang Sidrap Regency. The three things were (i) Implementation of School Operational Assistance Program In SMP 3 Panca Rijang Sidrap Regency. (ii) To know the supporting factors of School Operational Assistance Program in Smp 3 Panca Rijang of Sidrap Regency, and (iii) To know the obstacle factors of School Operational Assistance Program in Smp 3 Panca Rijang of Sidrap Regency.

The method used in this research was using qualitative descriptive research method where the researcher attempts to understand, describe, explained with theory in the qualitative form that was obtained from research field.

The results showed that the implementation of BOS program in SMP Negeri 3 Panca Rijang Sidrap Regency is divided from the stage of planning, liquefaction, utilization, accountability and evaluation process. 1) The planning process includes; school account creation, establishment of school BOS budget management teams, filling dapodik routinely, and preparation of school budget activity plans (RKAS); 2) The liquefaction process; after the budget is included in the school account, the principal or treasurer of the school as BOS budget manager 3) BOS utilization phase: the BOS fund received by the principal or treasurer will be allocated in accordance with the school budget activity plan (RKAS) utilized in accordance with the RKAS that has been reported, 4) Accountability Process: schools make accountability report (LPJ) using software provided by the Office of Education and Culture in preparing accountability reports. The factors supporting the implementation of school operational assistance (BOS) programs In SMP Negeri 3 Panca Rijang Sidrap Regency, were. (a) good form of cooperation by all BOS budget management teams, both BOS budget teams of provincial, regency and school BOS fund managers, (b) the technological support that is in the presence of technology, the work of budget managers can be easier and faster, (c) the assistance by education offices for schools experiencing difficulties in managing the BOS funds in schools, (d) the existence of BOS technical guidelines used as guidelines for implementing BOS funds program. obstacles in the implementation of school operational assistance programs were; (a) the delay in liquefaction of the budget, (b) the limited human resources in the management of the BOS budget, (c) the function of the school committee as supervisor not yet effective.

Keywords: *The Implementation of School Operational Assistance Program (BOS)*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tiga hal yang mengakut tentang Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah Di SMP Negeri 3 Panca Rijang Kabupaten Sidrap. Adapun ketiga hal tersebut yaitu (i) Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah Di Smp Negeri 3 Panca Rijang Kabupaten Sidrap. (ii) Untuk mengetahui faktor pendukung Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah Di Smp Negeri 3 Panca Rijang Kabupaten Sidrap, dan (iii) Untuk mengetahui faktor penghambat Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah Di Smp Negeri 3 Panca Rijang Kabupaten Sidrap.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang dimana peneliti berupaya untuk memahami, mendeskripsikan, menjelaskan dengan teori dalam bentuk kualitatif apa yang diperoleh dari lapangan penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Sekolah Di SMP Negeri 3 Panca Rijang Kabupaten Sidrap, telah melaksanakan program bantuan operasional sekolah (BOS) dengan baik yaitu sesuai dengan aturan pemerintah yang dimuat dalam petunjuk teknis Pengelolaan bantuan operasional sekolah (JUKNIS pengelolaan BOS tahun 2017). Meskipun masih ada beberapa yang perlu dibenahi seperti salah satunya peran komite sekolah sebagai pengelola dan sekaligus pengawas dana BOS diharapkan dapat membuka informasi tentang dana BOS kepada orang tua siswa guna menjaga transparansi, dan seluruh pengelola anggaran dana BOS harus benar-benar memperhatikan prinsip-prinsip dalam pemanfaatan anggaran sehingga dana dapat berfungsi lebih maksimal (2) faktor-faktor pendukung pelaksanaan program bantuan operasional sekolah Di SMP Negeri 3 Panca Rijang Kabupaten Sidrap yaitu. (a) Dukungan Pemerintah dengan memberikan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS dan sosialisasi tentang tatacara pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dari Dinas Pendidikan (b) terjalinnnya bentuk kerja sama yang baik

dari pihak pengelola dana BOS, Komite Sekolah dan para Guru, Pemerintah (Dinas Pendidikan) (c) motivasi yang tinggi dan kinerja yang maksimal untuk mengembangkan kualitas pendidikan, (d) dukungan dari para guru baik dengan sumbangan pemikiran maupun dengan dukungan tenaga. (3) faktor penghambat dalam pelaksanaan program bantuan operasional sekolah yaitu; (a) waktu pencairan dana sering mengalami keterlambatan, (b) Anggaran yang diperoleh tidak sebanding dengan kebutuhan sekolah (c) sekolah dibatasi dalam melakukan perbaikan berat sehingga sekolah masih mengalami kekurangan ruangan, dan (d) Dana bantuan operasional sekolah belum mampu membiayai seluruh program sekolah secara merata/menyeluruh.

Kata Kunci: *Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peranan yang sangat strategis dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas agar bangsa kita memiliki sumber daya manusia yang ahli, terampil, kreatif dan inovatif. Pengembangan sumber daya manusia telah lama menjadi perhatian oleh seluruh pihak baik pemerintah maupun seluruh warga Negara Indonesia, ini dapat dilihat dari ketetapan MPR-RI nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN yang menyebutkan bahwa salah satu visi pembangunan bangsa adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mewujudkan visi tersebut GBHN 1999 telah menyatakan bahwa salah satu arah kebijakan dalam pembangunan pendidikan adalah melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip setralisasi, ekonomi keilmuan dan manajemen.

Selain permasalahan mutu yang telah dikemukakan diatas, masalah kurangnya ketersediaan fasilitas ruang belajar yang menyebabkan siswa harus ditumpuk dalam ruang kelas yang sesak (lebih dari 40 siswa), dan kondisi bangunan yang tidak layak, serta banyaknya SLTP/MTs yang belum memiliki fasilitas yang lengkap merupakan problem tersendiri baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sementara itu rendahnya anggaran pendidikan juga disinyalir sebagai salah satu penyebab merosotnya mutu pendidikan. Anggaran pendidikan sebesar 20 % yang telah dijelaskan dalam amandemen UUD 1945 pasal 31 ayat 4 belum juga menjadi kenyataan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 (tujuh sampai dengan lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 34 ayat (2)

menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Sekarang yang menjadi pusat perhatian dalam dunia pendidikan yaitu adanya program bantuan operasional sekolah (BOS) yang diluncurkan oleh pemerintah sebagai solusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Berdasarkan Permendikbud No 8 tentang Juknis pengelolaan dana BOS 2017. BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun yang dicanangkan sejak 2 Mei 1994 merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas serta mempermudah akses pendidikan di Indonesia. Program wajib belajar 9 tahun ini tercapai dengan menciptakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2005. Seiring berjalannya waktu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan, dan orientasi-program BOS. Program BOS bukan hanya berperan untuk mempertahankan jumlah peserta didik saja, namun juga harus berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan dasar. Selain itu kenaikan jumlah Dana BOS yang signifikan mulai tahun 2009 diharapkan akan menjadikan BOS sebagai pilar utama mewujudkan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya.

Program wajib belajar 9 tahun tersebut berhasil meningkatkan angka partisipasi kasar dalam pendidikan tingkat dasar. Tuntasnya

program wajib belajar 9 tahun ini antara lain diukur melalui tambahnya jumlah gedung dan ruang kelas baru di dekat masyarakat yang banyak memiliki anak-anak wajib belajar (usia 7-15 tahun), memperluas jangkauan SMP terbuka dan menambah tempat kegiatan belajar (TKB) dan kejar paket B, serta meningkatnya peran dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan wajib belajar. Keberhasilan program wajib belajar 9 tahun tersebut adalah meningkatnya jumlah siswa lulusan SMP yang harus ditampung oleh sekolah jenjang menengah. Namun kondisi yang ada saat ini, partisipasi pendidikan masyarakat cenderung menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Angka partisipasi masyarakat pada jenjang pendidikan dasar lebih tinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan menengah. Demikian pula angka partisipasi masyarakat pada pendidikan tinggi lebih rendah dibandingkan dengan partisipasi pendidikan menengah.

Berdasarkan permasalahan di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan rintisan program wajib belajar 12 tahun. Salah satu tujuan program tersebut adalah memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat terutama yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan layanan pendidikan jenjang menengah.

Pentingnya Pengelolaan Dana BOS yaitu, dengan Pengelolaan yang baik akan mampu membantu ketercapaian tujuan dari program BOS dengan efektif dan efisien. Unsur-unsur yang terlibat dalam pengelolaan BOS adalah tim manajemen BOS pusat, tim manajemen BOS provinsi, tim manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan Sekolah. Semua unsur yang terlibat dalam pengelolaan BOS ini diharapkan dapat memahami ketentuan-ketentuan teknis yang harus dijalankan dalam rangka penyelenggaraan program BOS. Kesalahan pemahaman oleh pengelola dapat

menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan program BOS.

Sekolah menempati posisi yang sangat penting dalam penentuan penggunaan dana BOS. Sekolah boleh menggunakan dana BOS tersebut untuk beberapa jenis pengeluaran sesuai juklak program dan berdasarkan rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) yang disusun oleh sekolah dan komite sekolah.

Adapun permasalahan-permasalahan umum yang terjadi dalam pengelolaan dana BOS yaitu seperti; sekolah SD dan SMP rata-rata tidak memiliki tenaga administrasi sehingga pengolah dana bantuan operasional sekolah (BOS) harus dilakukan oleh guru kelas atau guru mata pelajaran, SD dan SMP rata-rata tidak memiliki pengetahuan mengenai akuntansi ataupun perpajakan secara spesifik sehingga sekolah akan menunjuk guru atau staf tata usaha yang tidak berkompeten dalam hal pengelolaan dana BOS. Sedangkan dalam pengelolaan dana BOS membutuhkan tenaga ahli dikarenakan dana yang dikelola cukup besar dan menyangkut kepentingan orang banyak.

Dalam hasil pemeriksaan BPK terhadap sekolah penerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) di DKI Jakarta pada tahun 2007-2009 telah terjadi penyelewengan pengelolaan dana sebesar Rp. 5,7 milyar. Berdasarkan audit BPK untuk tahun 2007 dan semester I 2008 pada 3.237 sekolah di 33 provinsi, ditemukan nilai penyimpangan dana bantuan operasional sekolah BOS lebih kurang Rp. 28 milyar. Penyimpangan tersebut terjadi di 2.054 atau 63,5%. (Analisis pengelolaa Monika Jayatri, 2012).

Berdasarkan hasil opservasi penulis disekolah SMP Negeri 3 Panca Rijang Kabupaten Sidrap yang menyangkut tentang pelaksanaan program dana bantuan operasional sekolah BOS, Penulis melihat pelaksanaan BOS di sekolah tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan program BOS (Juknis pengelolaan dana BOS) anggaran

dana BOS yang diterima telah di gunakan/manfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti tidak dipungut lagi pembayaran bagi seluruh siswa, seluruh kegiatan ekstrakurikuler menggunakan dana BOS, gaji guru honorer diambil dari dana BOS, seluruh kegiatan dan kebutuhan sekolah semuanya menggunakan dana BOS namun masih ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi seperti; sekolah sering terkendala dalam pembuatan RAPBS yang dimana sekolah harus membuat RAPBS sebelum dana BOS dicairkan namun sekolah sering terlambat dalam penyusunan RAPBS. terjadinya perselisihan antara guru-guru dengan pihak-pihak pengelola dana BOS yang menganggap tidak transparannya pengelolaan dana BOS tersebut, pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS yang masih longgar sehingga memberikan kemungkinan adanya penyelewengan yang terjadi dalam lingkup sekolah.

Berdasarkan permasalahan diatas maka dari itu penulis ingin lebih jauh mengetahui permasalahan yang ada dengan meneliti “Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 3 Panca Rijang Kabupaten Sidrap”.

Sebagai batasan dari permasalahan diatas maka peneliti merumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program bantuan operasional sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Panca Rijang Kabupaten Sidrap ?
2. Apa faktor pendukung pelaksanaan program bantuan operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Panca Rijang Kabupaten Sidrap ?
3. Apa faktor penghambat pelaksanaan program bantuan operasional sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Panca Rijang Kabupaten Sidrap ?

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui ;

1. Pelaksanaan program bantuan operasional sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Panca Rijang Kabupaten Sidrap
2. Faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan program bantuan operasional sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Panca Rijang Kabupaten Sidrap.
3. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program bantuan operasional sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Panca Rijang Kabupaten Sidrap.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif yang dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan program bantuan operasional sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Panca Rijang Kabupaten Sidrap. dengan tujuan untuk menguraikan secara deskriptif mengenai pelaksanaan program bantuan operasional sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Panca Rijang Kabupaten Sidrap.

Fokus penelitian ini adalah Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 3 Panca Rijang, meliputi: (1) bentuk Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Negeri 3 Panca Rijang Kabupaten Sidrap. (2) faktor pendorong pelaksanaan program bantuan operasional sekolah (BOS) Negeri 3 Panca Rijang Kabupaten Sidrap. (3) faktor penghambat pelaksanaan program bantuan operasional sekolah (BOS) Negeri 3 Panca Rijang Kabupaten Sidrap.

Deskripsi fokus penelitian sangatlah diperlukan dalam memahami masalah penelitian, oleh karena itulah akan disajikan deskripsi fokus penelitian yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1 Pelaksanaan program bantuan operasional sekolah (BOS) adalah proses penggunaan atau pemanfaatan bantuan dana yang diberikan kepada sekolah dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan sekolah.

- 2 Faktor pendukung pelaksanaan program bantuan operasional sekolah (BOS) adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang pelaksanaan program BOS disekolah yang berifat mendukung keberhasilan dari pelaksanaan program BOS.
- 3 Faktor penghambat pelaksanaan program bantuan operasional sekolah (BOS) adalah segala sesuatu yang menyangkut hal-hal yang dapat memberikan hambatan terhadap tercapainya tujuan dari pelaksanaan program BOS.

Sumber data dalam penelitian ini yang selanjutnya disebut narasumber ditetapkan secara purposif dengan kriteria bahwa subjek atau narasumber memahami tentang Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 3 Panca Rijang Kabupaten Sidrap. Subjek penelitian atau nara sumber yang dipilih adalah Kepala Sekolah, Komite sekolah, administrasi pengelola dana BOS, Bendahara Sekolah, dan guru.

Untuk memudahkan dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

Untuk menunjang kelancaran kegiatan penelitian maka digunakan pedoman seperti: (1) pedoman wawancara dalam Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 3 Panca Rijang Kabupaten Sidrap, (2) pedoman dokumentasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 3 Panca Rijang Kabupaten Sidrap, (3) pedoman observasi dalam melakukan pengamatan Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 3 Panca Rijang Kabupaten Sidrap.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, hal ini dilakukan dengan menguraikan atau menggambarkan Pelaksanaan Program Bantuan

Operasional Sekolah di SMP Negeri 3 Panca Rijang Kabupaten Sidrap. Teknik pengabsahan data (uji kreadibilitas data) dilakukan dengan Triangulasi dan membercheck.

Hasil Penelitian

1. Proses Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dalam upaya Untuk mengetahui tentang proses pelaksanaan program bantuan oprasional sekolah di SMP Negeri 3 Panca Rijang Kabupaten Sidrap maka dilakukan proses wawancara terhadap informan yang telah ditentukan sebelumnya.

Maka diperoleh hasil wawancara dari kepala sekolah SMP Negeri 3 Panca Rijang yang menyangkut tentang pelaksanaan program dana BOS khususnya tentang pedoman pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, beliau mengutarakan sebagai berikut:

“menyangkut tentang pelaksanaan program bantuan oprasional sekolah sebenarnya kami para pengelolah dana BOS selalu mengacu terhadap petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga dana bantuan yang diterima akan diperuntukkan hanya untuk kepentingan-kepentingan yang telah tercantum dalam petunjuk teknis itu, adapun uraian alokasi dana yang kami gunakan yaitu diperuntukkan seperti: (1) pengembangan perpustakaan, (2) kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, (3) kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa, (4) kegiatan ulangan dan ujian, (5) langganan daya dan jasa, (6) perawatan sekolah/rehab ringan dan senitasi sekolah, (7) pembayaran honorium bulanan, (8) pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, (9) biaya pengelolaan sekolah, (10) pembelian dan perawatan perangkat komputer, dan (11) biaya lain-

lain”. Wawancara (Sulaeman, 9 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka telah diperoleh informasi tentang proses pelaksanaan program dana bantuan operasional sekolah. Kepala sekolah sebagai pengelola program bantuan operasional dalam melaksanakan program tersebut, beliau selalu berpedoman terhadap petunjuk teknis tentang pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, sehingga program tersebut dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuan. Dalam petunjuk teknis telah dijelaskan tentang tujuan-tujuan dari program dana biaya operasional sekolah yaitu dana hanya diperuntukkan untuk pembiayaan yang bersifat kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun. Adapun dana BOS telah digunakan untuk: (1) pengembangan perpustakaan, (2) kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, (3) kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa, (4) kegiatan ulangan dan ujian, (5) langganan daya dan jasa, (6) perawatan sekolah/rehab ringan dan sanitasi sekolah, (7) pembayaran honorium bulanan, (8) pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, (9) biaya pengelolaan sekolah, (10) pembelian dan perawatan perangkat komputer, dan (11) biaya lain-lain.

Wawancara terhadap pihak Komite Sekolah yang menyangkut tentang pelaksanaan program bantuan operasional di sekolah tersebut khususnya tentang Mekanisme Pembelian Barang/Jasa Di Sekolah, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“pelaksanaan program bantuan operasional sekolah atau pemanfaatan dana BOS di sekolah ini sebenarnya telah berjalan sesuai dengan aturan yang telah berlaku (JUKNIS pengelolaan dana BOS) namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam setiap pemanfaatan dana tersenut sehingga penggunaan dana dapat maksimal dan efektif, seperti halnya: (1) Tim pengelola harus

menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan barang/jasa dan tempat pembeliannya, (2) Tim pengelola harus memperhatikan kualitas barang/jasa, serta ketersediaan, dan kewajaran harga, (3) Tim pengelola harus selalu membandingkan harga penawaran dari penyedia barang/jasa dengan harga pasar dan melakukan penawaran harga kepada penyedia barang, apabila harga penawaran lebih tinggi dari harga pasar, maka pengelola harus mampu melakukan penawaran, (4) Terkait dengan biaya untuk perawatan ringan/pemeliharaan bangunan sekolah, Tim pengelola harus menerapkan prinsip-prinsip berikut: (a) Membuat rencana kerja, (b) Memilih satu atau lebih pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan standar upah yang berlaku di masyarakat. (c) Membuat laporan penggunaan dana (pembelian barang dan pembayaran upah) untuk kegiatan perawatan ringan/pemeliharaan sekolah.” Wawancara (Nasaruddin, 9 Agustus, 2017).

Dari hasil wawancara diatas maka telah didapatkan deskriptif tentang pelaksanaan program bantuan operasional sekolah khususnya yang menyangkut tentang prosedur pembelian barang dan jasa yaitu proses pelaksanaan program bantuan operasional sekolah telah berjalan sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS, namun menurut informan dalam pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah sangat dibutuhkan kebijaksanaan dan kedewasaan terhadap penggunaan dana BOS sehingga akan bermanfaat secara maksimal dan efektif.

Seperti yang dijelaskan oleh bendahara pengelola bantuan operasional sekolah (BOS) dalam proses wawancara yang menyangkut tentang pelaksanaan program BOS khususnya menyangkut larangan-larangan penggunaan dana BOS beliau menjelaskan bahwa:

“Mengenai pelaksanaan program bantuan operasional sekolah sebenarnya dalam pelaksanaannya semuanya telah berjalan dengan baik sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan, namun dalam pemanfaatan dana ada beberapa hal perlu diperhatikan yang menyangkut tentang larangan penggunaan dana BOS yaitu seperti: membiayai pembuatan gedung baru, dipinjamkan kepihak lain, disimpan dalam rekening dalam jangka waktu lama, Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya. Pemanfaatan dana BOS ini memang benar-benar hanya diperuntukkan untuk membiayai keperluan sekolah yang sifatnya non operasional” wawancara (Fitriah, 9, Agustus 2017).

Sesuai dengan hasil wawancara diatas maka telah ditemukan gambaran tentang pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah khususnya yang menyangkut tentang larangan-larangan penggunaan dana BOS. Adapun yang menjadi larangan didalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah yaitu seperti: menggunakan dana BOS untuk pembangunan gedung baru, dipinjamkan kepihak lain, disimpan dalam rekening dalam jangka waktu lama, Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya. Jadi tidak semua kebutuhan sekolah dapat dibiayai oleh dana Bantuan Operasional Sekolah sehingga pengelola dana harus berhati-hati didalam memanfaatkan dana tersebut.

Wawancara dengan seorang guru yang menyangkut tentang proses pelaksanaan bantuan operasional sekolah khususnya yang menyangkut tentang laporan pertanggung jawaban pengelolaan dana BOS. Beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Menurut saya segala sesuatu yang menyangkut tentang pendanaan lembaga/organisasi sangat diperlukan adanya LPJ untuk menjaga transparansi, sama halnya dengan penggunaan dana BOS ini sangat perlu dibuatkan LPJ yang memuat tentang segala perincian pengalokasian dana yang telah dimanfaatkan/digunakan sehingga transparansi dapat tercipta selain daripada itu, dengan adanya LPJ tersebut semua pihak dapat mengawasi dan mengetahui tentang pemanfaatan dana BOS tersebut. Dalam pelaksanaan kami di sekolah ini tentang pertanggung jawaban dana BOS maka pengelola akan selalu mengadakan rapat untuk membahas tentang keperluan-keperluan sekolah yang akan biayai sebelum menggunakan dana tersebut, setelah itu pihak pengelola akan membuat LPJ yang akan di sampaikan dalam rapat, setelah itu kemudian distorkan ke dinas pendidikan” wawancara (Rahmin Hamid, 9 Agustus 2017).

Sesuai hasil wawancara diatas maka telah ditemukan deskriptif menyangkut pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah khususnya tentang pertanggung jawaban pengelolaan dana BOS. Adapun proses pertanggung jawaban yang dimaksud ialah pihak pengelola akan mengadakan rapat dengan seluruh pihak sekolah sebelum menggunakan dana tersebut sebagai proses untuk memusyawarahkan keperluan-keperluan sekolah yang akan dibiayai. Setelah dana telah digunakan maka pihak pengelola dana bantuan operasional sekolah akan membuat perincian-perincian dana yang telah dimanfaatkan dan dibuatkan laporan pertanggungjawaban serta akan disampaikan dalam rapat sekolah, setelah itu akan diserahkan ke dinas pendidikan, sehingga pemanfaatan dana tersebut dapat dipantau dan diawasi oleh pihak-pihak yang berwenang.

2. Faktor pendukung pelaksanaan program bantuan operasional Sekolah (BOS).

Guna untuk mengetahui lebih jelas tentang faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan program dana bantuan operasional sekolah di SMP Negeri 3 Panca Rinjang Sidrap, maka dilakukan wawancara terhadap informan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun hasil wawancara yang diperoleh dari Kepala Sekolah beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Keberhasilan pelaksanaan dari program dana bantuan operasional sekolah yang kami kelola tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari pemerintah sampai dengan ke para rekan-rekan kerja saya adapun faktor pendukung itu seperti: kebijakan pemerintah tentang petunjuk pengelolaan dana BOS, adanya sosialisasi yang diberikan oleh dinas pendidikan tentang pengelolaan dana BOS, bentuk kerja sama yang baik dengan dinas pendidikan sehingga kami merasa terbantu dalam pengelolaan dana BOS ini, dukungan dari teman-teman guru yang telah bersama-sama berjuang membangun sekolah ini, dan tentunya dukungan itu juga kami dapatkan dari pihak komite sekolah yaitu para guru dan orang tua siswa telah menyumbangkan ide-ide dan pikiran mereka untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan ini”. Wawancara (Sulaeman, 9 Agustus, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka telah diperoleh informasi tentang faktor-faktor pendukung pelaksanaan program bantuan operasional sekolah yaitu: (1) kebijakan pemerintah tentang petunjuk pelaksanaan program bantuan operasional sekolah yang dimuat dalam JUKNIS pengelolaan dana BOS, adanya dukungan dari dinas pendidikan seperti memberikan sosialisasi tentang pelaksanaan bantuan operasional sekolah serta akan siap memberikan pendampingan, dukungan dari para guru yang telah secara bersama-sama bekerja

untuk mewujudkan tujuan sekolah, dan dukungan dari komite sekolah oleh guru dan para orang tua siswa/ tokoh masyarakat yang telah menyumbangkan ide-ide dan pikiran mereka untuk memajukan lembaga pendidikan ini sehingga tujuan-tujuan yang dicita-citakan dapat terwujud.

Untuk lebih memperjelas tentang faktor pendukung pelaksanaan program bantuan operasional sekolah maka dilakukan wawancara terhadap informan berikutnya yang telah ditentukan oleh peneliti yaitu pihak Komite Sekolah dan beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Tujuan dari bantuan operasional sekolah ini selain untuk meringankan beban masyarakat dan mengurangi angka anak putus sekolah, anggaran ini juga berguna untuk penyediaan fasilitas yang memadai serta pengembangan tenaga pendidik sehingga kualitas pendidikan semakin membaik, saya melihat dan merasakan semenjak berlakunya kebijakan tentang penggunaan dana BOS ini, banyak sekali perubahan yang terjadi seperti keadaan sekolah yang dulunya serba kekurangan sekarang ini fasilitasnya mulai terpenuhi sehingga dalam proses belajar-mengajar lebih efektif, kesadaran masyarakat terhadap pendidikan semakin meningkat sehingga siswa setiap tahunnya akan terus bertambah ini juga tentunya dampak dana BOS yang memberikan biaya gratis pendidikan. Dengan keberhasilan yang saya saksikan ini tidak terlepas dari motivasi dan keseriusan pengelola dana BOS didalam memanfaatkan anggaran tersebut semaksimal mungkin, dan tentunya kinerja Kepala Sekolah merupakan salah satu faktor pendukung yang dapat mengelola anggaran ini dengan baik sehingga memberikan hasil seperti yang sekarang ini. Wawancara (Nasaruddin, 9 Agustus 2017)

Sesuai hasil wawancara diatas maka telah ditemukan gambaran tentang faktor pendukung dari pelaksanaan program bantuan operasional sekolah yaitu bahwa penggunaan anggaran dana BOS memberikan manfaat yang sangat besar terhadap pendidikan dimana selain sebagai dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya dan juga merupakan anggaran yang berguna untuk memperbaiki kualitas pendidikan seperti digunakan untuk melengkapi fasilitas sekolah, pengembangan guru, dll. Sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan efektif. Salah satu faktor pendukung berhasilnya program bantuan operasional sekolah ialah kinerja Kepala Sekolah sebagai pengelola. Yang telah benar-benar mengelolah anggaran tersebut dengan baik dan efektif.

Demi mengetahui lebih lanjut tentang faktor-faktor pendukung keberhasilan program bantuan operasional sekolah maka dilakukan wawancara terhadap informan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu bendahara pengelola dana BOS. Beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Menyangkut tentang faktor yang pendukung pelaksanaan program dana BOS di sekolah ini menurut saya yaitu didukung oleh bentuk kerja sama yang terjalin dengan baik dari para guru sehingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, para pengelola dana BOS menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga hasil yang diperoleh dapat seperti sekarang ini yaitu seluruh fasilitas mulai terpenuhi, kegiatan-kegiatan siswa berjalan dengan baik, ketersediaan buku-buku di perpustakaan sangat memadai sehingga dapat meningkatkan minat baca pada siswa, serta peningkatan kualitas guru juga mulai dilakukan. Penggunaan dana BOS ini menurut saya suda tepat sasaran dimana dana tersbut betul-betul

digunakan untuk keperluan-keperluan yang sangat dibutuhkan oleh siswa dan tenaga pengajar. Wawancara (Fitriah, 9, Agustus, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka telah didapatkan gambaran tentang faktor-faktor pendukung pelaksanaan program bantuan operasional sekolah, yang menjadi salah satu faktor pendukung ialah bentuk kerja sama yang terjalin dengan baik sehingga para pengelola dana bantuan operasional sekolah dapat berfungsi sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Bentuk kerjasama yang baik antara pimpinan dan bawahan serta seluruh komponen sekolah membuat penggunaan dana BOS dapat secara maksimal dan efektif sehingga keperluan sekolah telah terpenuhi secara bertahap dan proses belajar-mengajar semakin efektif itu dikarenakan media pembelajaran semakin lengkap.

Wawancara selanjutnya dilakukan terhadap informan yang telah ditentukan sebelumnya guna untuk menambah informasi tentang faktor pendukung pelaksanaan program bantuan operasional sekolah. Seorang guru mengatakan sebagai berikut:

“Dukungan yang bisa kami berikan terhadap pelaksanaan program bantuan operasional sekolah ini yaitu kami para guru hanya bisa memberikan sumbangan pikiran seperti memberikan ide dan masukan terhadap penggunaan dana tersebut, serta kami para guru berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas kami baik sebagai pendidik juga sebagai pembembang lembaga pendidikan ini. Saya pribadi sangat menyadari bahwa guru merupakan kekuatan yang sangat penting dari sebuah lembaga pendidikan sehingga guru yang maksimal menjalankan tugasnya akan memberikan hasil dan dampak positif terhadap seluruh siswa. Selain daripada itu saya akan memberikan dukungan semaksimal

mungkin untuk melaksanakan program-program yang memiliki manfaat terhadap pengembangan peserta didik, pengembangan sekolah dan pengembangan kompetensi guru. Wawancara (Rahmin Hamid 9 Agustus, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat digambarkan bahwa yang menjadi salah satu faktor pendorong dari pelaksanaan program bantuan operasional sekolah ialah kesadaran semua guru untuk mengembangkan potensi anak didik, mengembangkan lembaga sekolah, dan mengembangkan kompetensi guru. Dengan tumbuhnya kesadaran tersebut akan memberikan dampak terhadap kinerja semua guru yaitu mereka akan secara maksimal melaksanakan fungsinya serta akan memberikan segala bentuk dukungan guna tercapainya tujuan yang diinginkan. Dukungan yang diberikan oleh seluruh guru terhadap seluruh program yang dilaksanakan akan memberikan dampak terhadap tercapainya hasil yang maksimal.

3. Faktor penghambat pelaksanaan program bantuan operasional sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Panca Rijang Kabupaten Sidrap

Menyangkut tentang faktor penghambat pelaksanaan program bantuan operasional sekolah maka dapat dipastikan seluruh sekolah memiliki kendala-kendala tersendiri yang dihadapi dalam proses penerapan dana BOS tersebut, baik itu masalah yang sifatnya secara langsung maupun tidak langsung, sehingga untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh pengelola dana BOS SMP Negeri 3 Panca Rijang Kabupaten Sidrap, Maka akan dilakukan wawancara terhadap beberapa informan yang telah di tentukan sebelumnya.

Wawancara dilakukan terhadap Kepala Sekolah sebagai pihak pengelola anggaran bantuan operasional sekolah di SMP Negeri 3 Panca Rijang Kabupaten Sidrap, guna

mengetahui faktor penghambat pelaksanaan program bantuan operasional sekolah. Beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Yang menjadi faktor penghambat didalam pelaksanaan program bantuan operasional sekolah khususnya di sekolah ini yaitu, pencairan dana BOS terkadang mengalami keterlambatan sehingga akan mengganggu program yang telah direncanakan, selain daripada itu laporan tentang perincian dana yang telah digunakan harus tepat waktu untuk dilaporkan sehingga kami terkadang para pihak pengelola harus mencari dana untuk menutupi keterlambatan tersebut. Jadi menurut saya hal ini harus segera diberikan solusinya sehingga tidak akan mengganggu pelaksanaan program bantuan operasional sekolah. Wawancara (Sulaeman, 9 Agustus 2017).

Dari hasil wawancara diatas maka telah didapatkan salah satu faktor penghambat yang dihadapi oleh para pengelola dana bantuan operasional sekolah dalam pelaksanaan program BOS di sekolah tersebut. Adapun faktor penghambat yang dihadapi ialah seringnya terjadi keterlambatan dalam pencairan dana bantuan operasional sekolah tersebut, sehingga memberikan dampak terhadap banyaknya pelaksanaan program-program sekolah yang tidak berjalan sesuai dengan jadwal, selain dari pada itu untuk menutupi ketarlambatan tersebut maka sekolah akan mencari sumbangan dana untuk menutupi keterlambatan tersebut dikarekan sekolah ahrus tepat waktu dalam memberikan laporan tentang rincian penggunaan dana tersebut terhadap Dinas Pendidikan. Harapan dari para pengelola anggaran dana BOS di sekolah tersebut ialah agar solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dengan cepat diatasi. Menyangkut besaran anggaran yang diterimah banyak sekolah merasa dana yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan

kebutuhan sekolah yang mereka butuhkan sehingga ini sering menjadi salah satu kendala yang sering dihadapi oleh pengelola.

Guna mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan program bantuan operasional sekolah selanjutnya maka dilakukan wawancara terhadap Komite Sekolah sebagai informan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam proses wawancara beliau menjelaskan sebagai berikut:

“program bantuan operasional sekolah yang disalurkan oleh pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan sebenarnya sudah sangat tepat dan efektif karena dimana semenjak program ini berjalan perkembangan yang terlihat terhadap sekolah sangat maju. Mengenai sistem pembagian anggaran yang dihitung dari jumlah siswa sebenarnya juga sudah bagus namun dalam penilaian saya secara pribadi ada kesenjangan yang sering terjadi yaitu dimana kebutuhan sekolah dengan anggaran yang diterima tidak sebanding sehingga masih banyak keperluan-keperluan yang harus dipenuhi atau dikembangkan belum bisa terwujud. kemudian menurut saya tujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan yang berkualitas tidak akan bisa terwujud karena dimana sekolah yang terbelakang akan selalu terbelakang ketimbang sekolah yang telah maju, mengapa demikian ? karena sekolah yang lebih maju akan selalu mendapatkan anggaran yang lebih besar untuk mengembangkan kualitas mereka sedangkan sekolah yang tertinggal dan memiliki siswa sedikit serta fasilitas tertinggal akan mendapatkan anggaran yang kecil untuk mengembangkan kualitas mereka, jadi sekolah terpencil/terbelakang akan mengalami kesulitan untuk menyetarakan dengan sekolah-sekolah lainnya. Wawancara (Nasaruddin, 9, Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka telah didapatkan salah satu faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program bantuan operasional sekolah. Adapun yang menjadi faktor penghambat yaitu adanya kesenjangan antara jumlah anggaran dana bantuan operasional sekolah yang diterima dengan besarnya kebutuhan sekolah artinya anggaran yang didapatkan belum mampu memenuhi kebutuhan sekolah sehingga pengelola harus memilih-milih hal apa yang didahulukan untuk dipenuhi sehingga pembangunan tidak dapat secara merata dan berakibat terhadap kualitas pendidikan yang masih jauh dari harapan.

Selain daripada itu hal yang dikeluhkan oleh pengelola dana BOS ialah sistem penetapan anggaran yang berdasarkan jumlah siswa, pengelola merasa dengan sistem yang seperti itu hanya memberi keuntungan terhadap sebagian sekolah khususnya sekolah yang telah maju dan memiliki siswa banyak mereka akan mendapatkan anggaran yang lebih besar dan tentunya kualitas mereka akan terus berkembang pesat, namun jika dibandingkan dengan sekolah yang masih terbelakang dan hanya memiliki jumlah siswa sedikit serta fasilitas yang terbelakang tentu hanya akan mendapatkan anggaran yang sedikit dengan jumlah kebutuhan yang sangat besar untuk mengembangkan kualitas mereka, sehingga hal ini akan menimbulkan kesenjangan antara anggaran yang diterima dengan jumlah biaya sekolah yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidikannya.

Guna untuk mengetahui lebih dalam tentang faktor-faktor penghambat pelaksanaan program bantuan operasional sekolah maka dilakukan wawancara lebih lanjut terhadap Bendahara pengelola dana BOS sebagai informan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam wawancara beliau menjelaskan bahwa:

“Yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program bantuan operasional sekolah yaitu pertama dana yang diterima masih jauh dari kebutuhan sekolah dan kedua sekolah masih dibatasi dalam pemanfaatan anggaran tersebut, seperti halnya sekolah dilarang menggunakan anggaran untuk perbaikan berat dll. Sehingga menurut saya meskipun fasilitas sudah dibeli namun jika tempatnya/ruangannya yang tidak ada akan memberikan masalah tersendiri. Misalnya contoh komputer sudah dibeli 20 unit namun masalahnya jika tempatnya belum tersedia atau ada bangunan namun tidak layak digunakan dan membutuhkan renovasi berat jadi pertanyaannya bagaimana solusi untuk kasus yang seperti ini. Menurut saya anggaran dana BOS akan lebih efektif jika sekolah diperbolehkan untuk melakukan perbaikan berat dan pembuatan gedung baru, jika perlu sekolah diberikan kebebasan didalam mendanai kebutuhan sekolah yang sesuai dengan kondisi yang mereka butuhkan. Wawancara (Fitriah, 9, Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka telah ditemukan salah satu yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan program bantuan operasional sekolah yaitu; aturan yang berlaku membuat sekolah tidak diberikan kebebasan untuk mendanai kebutuhan sekolah yang secara kondisi lebih dibutuhkan, misalnya melakukan perbaikan berat dan pembuatan gedung baru. Dengan tidak diperbolehkannya penggunaan dana BOS untuk melakukan perbaikan berat dan pengadaan gedung baru membuat banyak sekolah yang mengalami kekurangan gedung dan masih banyak ruangan yang mengalami kondisi memprihatinkan, hal ini akan menjadi salah satu masalah ketika fasilitas telah lengkap namun ruangan belum siap atau belum ada.

Wawancara selanjutnya terhadap seorang guru yang telah dijadikan sebagai

informan untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan program bantuan operasional sekolah di SMP Negeri 3 Panca Rinjang, dalam proses wawancara beliau mebatakan sebagai berikut:

“Menyangkut tentang faktor penghambat dalam pelaksanaan proram bantuan operasional sekolah, sebenarnya masih banyak yang menjadi penghambat, seperti salah satunya kita ketahui dana BOS dipergunakan untuk memberikan bantuan kepada siswa miskin namun program ini tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan anggaran yang didapatkan tidak mampu untuk membiayai seluruh siswa miskin yang ada di sekolah ini dan bahkan di tahun 2017 sekarang ini belum ada bantuan terhadap siswa miskin dari penggunaan dana BOS. Selain daripada itu didalam pengelolaan dana BOS penyaluran anggaran dilakukan dengan cara pertriwulan namun yang menjadi kendala yaitu pencairan dana sering mangalami keterlambatan sehingga akan mengganggu program-program sekolah, serta penggunaan dana BOS terlalu berkonsentrasi dalam pemenuhan fasilitas sekolah sehingga ada hak-hak yang terkadang dikesampingkan seperti bantuan terhadap siswa miskin”. Wawancara (Rahmin Hamid, 9 Agustus, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka telah ditemukan salah satu yang faktor penghambat dalam pelaksanaan program bantuan operasional sekolah di SMP Negeri 3 Panca Rinjang. Adapun faktor penghambat yang dimaksud yaitu bantuan oeprasional sekolah belum mampu memberikan pembiayaan secara menyeluruh terhadap siswa miskin dan kebanyakan anggaran hanya dipergunakan untuk penyediaan fasilitas sekolah.

Untuk memastikan kebenaran hasil wawancara informan maka peneliti

menggunakan metode dekumentasi untuk melihat arsip/dekumen tentang perincian penggunaan dana BOS tahun 2016-2017 khususnya untuk melihat bantuan terhadap siswa miskin. Adapun hasil yang ditemukan yaitu:

Berdasarkan dekumen tentang rincian penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) Triwulan III tahun pelajaran 2016 di SMP Negeri 3 Panca Rinjang yang dibuat pada 10 september 2016. Maka pada point ke-10 terdapat anggaran untuk membantu siswa miskin sebesar Rp. 6.750.000 sedangkan pada perincian penggunaan dana BOS pada tahun anggaran 2017 tidak terdapat lagi point atau daftar yang menyangkut tentang bantuan terhadap siswa miskin.

Dari hasil diatas maka dapat dikatakan bahwa penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada tahun anggaran 2017 untuk bantuan siswa miskin tidak lagi alokasikan oleh sekolah SMP Negeri 3 Panca Rinjang. Dari gambaran tersebut telah memberikan pembenaran terhadap hasil wawancara sebelumnya bahwa sekolah masih mengalami kekurangan dana. Sehingga banyak program-program yang tidak berjalan.

Pembahasan

1. Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah

Proses pelaksanaan program bantuan operasional sekolah yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 3 Panca Rinjang, berdasarkan hasil temuan yang diperoleh menunjukkan bahwa sekolah ini telah melaksanakan program bantuan operasional sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan peraturan Pemerintah yang telah dimuat dalam petunjuk teknis pengelolaan dan pertanggung jawaban dana BOS. Para pengelola telah menguasai dengan baik tahapan-tahapan pengelolaan dana tersebut baik dari proses perencanaan sampai

dengan ke proses evaluasi dan pertanggungjawaban.

Tujuan program bantuan operasional sekolah adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam upaya menciptakan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, maka diperlukan keikutsertaan tiap warga negara Indonesia secara aktif dalam pendidikan.

Pelaksanaan program BOS tidak serta merta dilaksanakan berdasarkan keinginan dan kebutuhan sekolah. Untuk itu, pemerintah menerbitkan buku petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS dalam setiap tahunnya. Dalam buku petunjuk tersebut sudah jelas tertulis aturan-aturan pelaksanaan program BOS mulai dari dasar penyelenggaraan program BOS, tujuan BOS, sasaran, pelaksanaan program, prosedur pelaksanaan BOS, komponen yang dapat dibiayai dana BOS, larangan penggunaannya, sampai pada monitoring dan laporan pertanggungjawaban sekolah, termasuk juga format-format kegiatan BOS serta pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program BOS di sekolah tersebut.

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Dana BOS harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah.

Prinsi-prinsip yang harus dimiliki oleh para pengelola didalam menggunakan dana BOS sehingga penggunaan dana dapat maksimal dan efektif, yaitu seperti halnya (1) Tim pengelola harus menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan barang/jasa dan tempat pembeliannya, (2) Tim pengelola harus memperhatikan kualitas

barang/jasa, serta ketersediaan, dan kewajaran harga, (3) Tim pengelola harus selalu membandingkan harga penawaran dari penyedia barang/jasa dengan harga pasar dan melakukan penawaran harga kepada penyedia barang, apabila harga penawaran lebih tinggi dari harga pasar, maka pengelola harus mampu melakukan penawaran, (4) Terkait dengan biaya untuk perawatan ringan/pemeliharaan bangunan sekolah, Tim pengelola harus menerapkan prinsip-prinsip berikut: (a) Membuat rencana kerja, (b) Memilih satu atau lebih pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan standar upah yang berlaku di masyarakat. (c) Membuat laporan penggunaan dana (pembelian barang dan pembayaran upah) untuk kegiatan perawatan ringan/ pemeliharaan sekolah, (Permendikbud No 08. 2017).

Dalam pelaksanaan dana BOS, ini dibagi menjadi 8 standar penggunaan atau aliran dana BOS yaitu: Pengembangan Kompetensi Kelulusan, Pengembangan Standar Isi, Pengembangan Standar Proses, Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah, Pengembangan Standar Pengelolaan, Pengembangan Standar Pembiayaan, Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian.

2. Faktor Pendukung Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah

Faktor-faktor pendukung keberhasilan dari pelaksanaan program bantuan operasional sekolah yaitu segala sesuatu yang memberikan dukungan baik berbentuk kebijakan, berbentuk kerja sama yang baik, berbentuk dukungan material, berbentuk sumbangan pemikiran, dukungan berbentuk tenaga, dll. Keberhasilan suatu program tidak terlepas dari dukungan dari segala sektor sehingga pelaksanaannya akan lebih mudah menuju keberhasilan yang diinginkan. Sehingga semakin banyak dukungan positif yang didapatkan dalam pelaksanaan

program maka semakin besar peluang untuk mencapai keberhasilan.

Dalam pelaksanaan program bantuan operasional sekolah juga sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung untuk mewujudkan tujuan yang direncanakan. Adapun faktor-faktor yang mendukung yaitu: (1) dukungan pemerintah dengan memberikan sosialisasi pengelolaan dana BOS dan pemberian petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, (2) bentuk kerja sama yang terjalin dengan baik oleh para pengelola dengan seluruh guru dan komite sekolah, (3) motivasi dan tekad yang kuat dari seluruh pihak sekolah untuk memajukan kualitas pendidikan, (4) kinerja kepala sekolah yang baik.

3. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dalam proses pelaksanaan program bantuan operasional sekolah di SMP Negeri 3 Panca Rinjang juga mengalami hal-hal yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan pelaksanaan program bantuan operasional sekolah tersebut seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa salah satu yang dapat membuat suatu kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik yaitu dikarenakan kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya kurang memperhatikan masalah teknis, hal ini dapat dibuktikan dimana dalam peraturan yang dimuat dalam petunjuk teknis pengelolaan dana BOS, Sekolah tidak diberikan kebebasan untuk menggunakan dana bantuan operasional tersebut sesuai dengan kebutuhan sekolah, seperti misalnya sekolah tidak diperbolehkan untuk melakukan perbaikan berat dan pembuatan gedung baru menggunakan dana BOS. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat untuk mencapai tujuan yang direncanakan yaitu meningkatkan kualitas pendidikan.

Selain daripada itu dalam proses pelaksanaan program bantuan operasional

sekolah juga mengalami Adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantu (waktu, uang dan sumber daya manusia), untuk permasalahan waktu yang menjadi masalah yaitu ketika pencairan dana bantuan operasional sekolah sering mengalami keterlambatan sehingga akan berdampak terhadap program-program sekolah yang tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, kemudian permasalahan yang terjadi terhadap uang/anggaran yaitu dimana anggaran bantuan operasional sekolah yang diterima oleh sekolah tertentu khususnya sekolah terbelakang tidak sebanding dengan kebutuhan sekolah tersebut sehingga pembangunan yang terjadi tidak efektif dan sifatnya tidak menyeluruh serta ini berdampak terhadap keberhasilan yang tidak maksimal sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

Penentuan anggaran Program bantuan operasional (BOS) yang diperoleh sekolah penerima dana BOS yaitu ditentukan dari banyak atau sedikitnya jumlah siswa, semakin banyak siswa suatu sekolah maka anggaran yang diperoleh semakin besar dan sebaliknya semakin sedikit siswa suatu sekolah maka semakin kecil anggaran dana BOS yang diterima. Dalam hal ini sesuai dengan teori diatas maka dapat dikatakan Kebijakan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. SMP Negeri 3 Panca Rinjang dalam proses pelaksanaan program bantuan operasional sekolah (BOS) telah berjalan sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (JUKNIS BOS). Adapun proses pelaksanaan yang dilakukan yaitu: (a) membuat rencana anggaran belanja sekolah (RAPBS), (b) Diadakan rapat yang dihadiri oleh kepla sekolah,

pihak pengelolah dana BOS, Komite Sekolah, guna untuk membahas tentang pemanfaatan dana BOS, (c) dana dialokasikan untuk program-program seperti (1) pengembangan perpustakaan, (2) kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, (3) kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa, (4) kegiatan ulangan dan ujian, (5) langganan daya dan jasa, (6) perawatan sekolah/rehab ringan dan senitasi sekolah, (7) pembayaran honorium bulanan, (8) pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, (9) biaya pengelolaan sekolah, (10) pembelian dan perawatan perangkat komputer, dan (11) biaya lain-lain, (c) Membuat rincian penggunaan dana bantuan operasional sekolah dalam bentuk laporan pertanggung jawaban yang akan di rapatkan dan diserahkan ke Dinas Pendidikan, dan (d) Melakukan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan.

2. Faktor pendukung dalam proses pelaksanaan program bantuan operasional sekolah (BOS) yaitu adanya (a) Dukungan Pemerintah dengan memberikan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS dan sosialisasi tentang tatacara pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dari Dinas Pendidikan (b) terjalinnnya bentuk kerja sama yang baik dari pihak pengelolah dana BOS, Komite Sekolah dan para Guru, Pemerintah (Dinas Pendidikan) (c) motivasi yang tinggi dan kinerja yang maksimal untuk mengembangkan kualitas pendidikan, (d) dukungan dari para guru baik dengan sumbangan pemikiran maupun dengan dukungan tenaga.
3. Faktor penghambat dalam proses pelaksanaan program bantuan operasional sekolah (BOS) yaitu: (a) waktu pencairan dana sering mengalami keterlambatan, (b) Anggaran yang diperoleh tidak sebanding dengan kebutuhan sekolah (c) sekolah

dibatasi dalam melakukan perbaikan berat sehingga sekolah masih mengalami kekurangan ruangan, dan (d) Dana bantuan operasional sekolah belum mampu membiayai seluruh program sekolah secara merata/menyeluruh.

Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas maka peneliti menawarkan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Pendidikan disarankan agar lebih aktif untuk merespon permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pihak pengelola dana bantuan operasional sekolah (BOS).
2. Kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Panca Rinjang selaku pimpinan dan penanggung jawab dari anggaran dana bantuan operasional sekolah (BOS) disarankan untuk tetap transparansi serta bijak didalam memanfaatkan anggaran bantuan operasional sekolah.
3. Kepada Komite Sekolah baik guru, orang tua siswa, dan tokoh masyarakat disarankan untuk keterlibatannya dalam mengawasi pelaksanaan dana bantuan operasional sekolah tersebut. Serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan solusi-solusi penyelesaian masalah.
4. Kepada semua guru SMP Negeri 3 Panca Rinjang baik yang berstatus PNS maupun Non PNS disarankan agar terus dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dikelas serta berusaha memenuhi standar-standar kompetensi tenaga pendidik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 1997. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Renneka Cipta
- Adawiah, Rabiatul, & . Karim. 2011. *Implementasi Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Bagi Siswa Miskin*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat
- Atas. 2014. Direktorat Pembinaan SMA: Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bambang, Tutoko. 2006. *Pelaksanaan Penyusunan Rencana Anggaran Pengeluaran Belanja Sekolah (RAPBS)*. Jakarta. Universitas Indonesia
- Danumihardja, Mintarsih. 2004. *Manajemen Keuangan Sekolah*. Bandung: UHMKA.
- Dharmasraya, Putra. 2009. *Manajemen Keuangan Sekolah*. Jakarta
- Depdiknas & Depag. 2006. *Buku Panduan Oprasional Sekolah (BOS) Dalam Rangka Belajar 9 Tahun*. Jakarta: Depdiknas
- Harsono. 2008. *Model-Model Pengelolaan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Husnaini Usman. 2006. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Pascasarjana UNY
- Indra Bastian. 2006. *Akuntansi Pendidikan*. Jakarta: Erlangga
- Irawan, Ade, Dkk. 2004. *Mendagangkan Sekolah: Studi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di DKI Jakarta*. Jakarta: Indonesia corruption watch.
- Malayu S.P. Hasibuan. 2007. *Manajemen dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mentri Dalam Negeri. 2017. *Tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan Dan*

- Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.* Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Mulyono. 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mulyasa E. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Fattah, Nanang . 2002. *Landasan Manajemen Pendidikan.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nurdin,usman. 2002. *Kontek Implementasi Berbasis Kurikulum.* Jakarta: Mandiri Pustaka
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun. 2008. *Tentang Pendanaan Pendidikan.* Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pemerintah republik Indonesia. 2011. *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah Dalam Laporan Keuangan Bantuan Oprasional Sekolah Tahun Anggaran 2012.* Jakarta: Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
- Permendikbud No 08. 2017. *Petunjuk Teknis Tentang Pelaksan Program Dana BOS 2017.* Jakarta: Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
- Menteri Pendidikan. 2010. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun Anggaran 2011.* Jakarta: Mentri pendidikan.
- Sagala, Saeful. 2007. *Manajemen stratejik dalam meningkatkan mutu pendidikan.* Bandung: Alfabeta
- Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana. 2008. *Manajemen Pendidikan.* Yogyakarta: Aditya Media bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY.
- Supriadi, Didi. 2006. *Satuan biaya pendidikan dasar dan menengah.* Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Suyanto. 2009. *Buku panduan oprasional sekolah (BOS) untuk pendidikan gratis dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermut.* Jakarta: Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depertemen Pendidikan Nasional.
- Soenarko.2000. *Public Policy. Pengertian-Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan pemerintah.* Surabaya: Airlangga University Press,